

Analisis Rumah Tangga Penerima PKH Berdasarkan Faktor Sosio-Ekonomi dan Demografi terhadap Kemiskinan

Isti Dyah Medina¹, Achmad Kautsar^{1*}, Feriansyah¹, Nanda Rembulan Nurdianto¹

¹Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pertamina, Jakarta Selatan, 12220, Indonesia

*) Corresponding author: kautsarachmad@gmail.com

[Accepted 26-06-2024: Revision 26-07-2024: Published 15-08-2024]

Abstract

This research is related to the high poverty rate in Indonesia and the government's efforts to alleviate poverty through subsidies, one of which is the Family Hope Program (PKH). The purpose of this study was to analyze the poverty of PKH households based on PKH beneficiary status, education, employment status, number of household members, and area of residence. The data used is secondary data obtained from the March 2020 National SocioEconomic Survey (Susenas), with a total of 15.254.235 observations. The method used is the logit regression with marginal effect interpretation. The results show that PKH beneficiary status and area of residence have a positive effect on poverty. Meanwhile, education, employment, and number of household members have a negative effect on poverty. Thus, it is recommended that the government continue to validate and update data so that the assistance provided can continue to target the poor.

Keywords: PKH, poverty, socioeconomic, subsidy, susenas, welfare

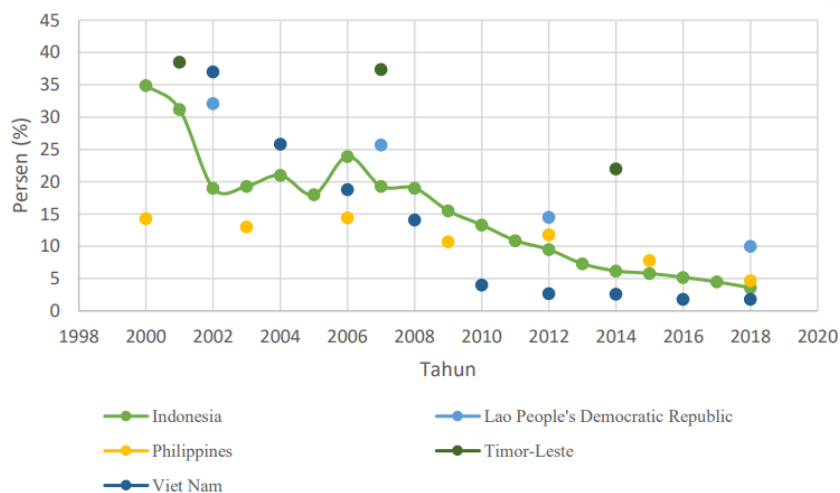
Abstrak

Penelitian ini berkaitan dengan kondisi kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi dan faktor-faktor sosio-ekonomi yang mempengaruhi kemiskinan serta upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui subsidi yang salah satu programnya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kemiskinan rumah tangga PKH berdasarkan status penerima PKH, pendidikan, status pekerjaan, jumlah anggota rumah tangga, dan daerah tempat tinggal. Adapun data yang digunakan merupakan data sekunder yang didapatkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020 dengan observasi sebesar 15.254.235. Metode yang digunakan adalah regresi logistik dengan interpretasi marginal effect. Hasilnya menunjukkan bahwa status penerima PKH dan daerah tempat tinggal berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Sedangkan, pendidikan, pekerjaan, dan jumlah anggota rumah tangga berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Dengan demikian, disarankan bagi pemerintah untuk terus melakukan validasi dan pemutakhiran data agar bantuan yang diberikan dapat terus menjangkau kepada masyarakat miskin yang lebih membutuhkan.

Kata kunci: PKH, kemiskinan, sosio-ekonomi, subsidi, sejahtera, susenas

Pendahuluan

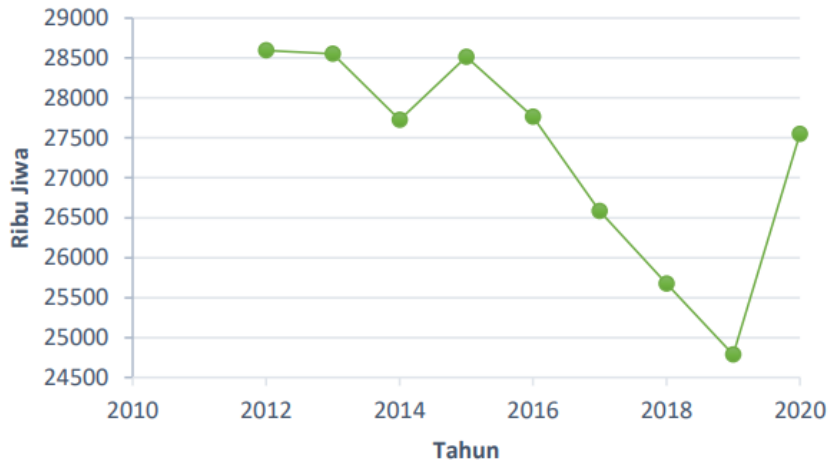
Menurut Laporan Poverty and Shared Prosperity yang diterbitkan oleh World Bank (2022), pengentasan kemiskinan ekstrem di dunia hingga 3% tidak akan tercapai pada tahun 2030, dikarenakan proyeksi tingkat kemiskinan tahun 2030 diperkirakan hanya turun menjadi 6,8%. Proyeksi tersebut jauh dari target Sustainable Development Goals (SDGs). Penyebab tidak tercapai target SDGs tersebut dikarenakan di antara tahun 2014 dan 2019 laju penurunan kemiskinan melambat, di antara 2008 dan 2013 laju penurunan kemiskinan sekitar 1,4% setiap tahunnya, kini menjadi 0,6% setiap tahunnya (World Bank, 2022). Alasan mengapa perlambatan penurunan kemiskinan terjadi karena tidak semua wilayah memiliki pertumbuhan ekonomi yang sama dan berhasil menurunkan kemiskinan (World Bank, 2022). Target SDGs mengenai pengentasan kemiskinan akan sulit tercapai jika hanya beberapa negara yang mampu berkontribusi dalam penurunan kemiskinan. Hal yang sama juga terjadi di Asia Tenggara, walaupun kemiskinan ekstrem di level Asia Tenggara mengalami penurunan yang signifikan di beberapa negara dari 17% di tahun 2005 menjadi 7% di tahun 2013 (Strawson & Davis, 2017).



Gambar 1. Proporsi penduduk yang hidup kurang dari \$1.9 per hari (*purchasing power parity 2011*)

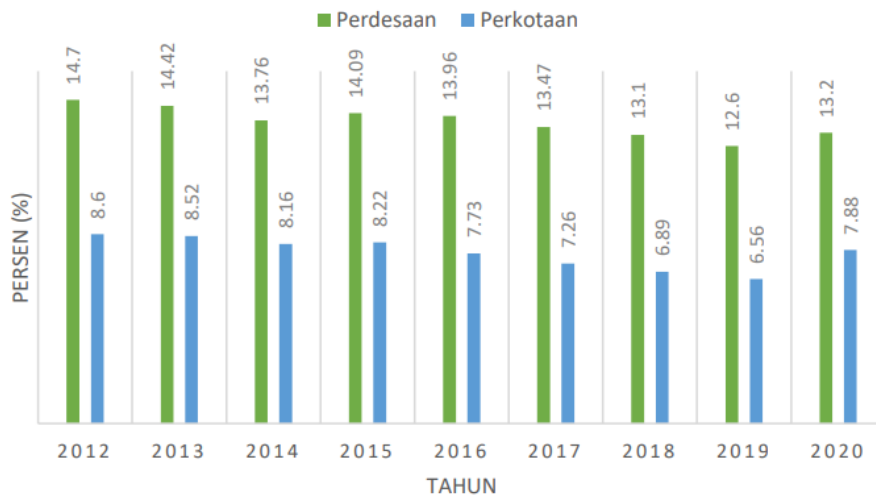
Sumber: Asian Development Bank

Penurunan kemiskinan yang cepat hanya terjadi di negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, seperti Indonesia dan Vietnam, sementara Filipina dan Laos tidak mengalami hal yang sama (ASEAN Secretariat, 2015; Balisacan et al., 2005). Berdasarkan Gambar 1, kemiskinan tertinggi di Asia Tenggara berada di negara Timor Leste, dengan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan lebih dari 15% di tahun 2014, disusul oleh negara Laos dengan proporsi sebesar 10% ditahun 2018. Dapat terlihat juga, negara Vietnam mengalami penurunan kemiskinan yang signifikan dari tahun 2008 yang semula memiliki proporsi kemiskinan 14% menjadi 4% di tahun 2010. Penurunan kemiskinan secara signifikan yang dialami Vietnam disebabkan oleh peningkatan pendapatan upah yang diiringi dengan peningkatan permintaan tenaga kerja dan transformasi agrikultur (Pimhidzai, 2018). Sedangkan di Indonesia, kemiskinan mulai mengalami penurunan secara bertahap tiap tahunnya dari tahun 2008.



Gambar 2. Jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2012-2020
Sumber: BPS (diolah)

Berdasarkan Gambar 2, menjelaskan mengenai jumlah penduduk miskin di Indonesia selama sembilan tahun terakhir. Terlihat bahwa jumlah penduduk miskin mulai mengalami penurunan secara konsisten dari tahun 2012 hingga 2019, artinya penduduk yang keluar dari kategori miskin yang ditetapkan oleh pemerintah berkurang setiap tahunnya. Pada tahun 2020, kemiskinan kembali meningkat karena terjadinya pandemi covid-19 yang menghasilkan pembatasan sosial sebagai upaya dalam mencegah penyebaran virus, sehingga aktivitas perekonomian tidak dapat beroperasi secara maksimal. Akibatnya, laju pendapatan nasional per kapita menurun pada tahun 2020 (Izzati, 2021).



Gambar 3. Persentase penduduk miskin berdasarkan wilayah (2012-2020)
Sumber: BPS (diolah)

Berdasarkan Gambar 3, kemiskinan di Indonesia lebih banyak terjadi di perdesaan dibandingkan di perkotaan. Kemiskinan di perdesaan setiap tahunnya melebihi 10%, sedangkan di perkotaan persentase kemiskinan tidak melebihi angka 9%. Kemiskinan yang terjadi di perdesaan dikarenakan oleh sulitnya akses terhadap pelayanan publik,

infrastruktur, dan perlindungan sosial (Lee & Kind, 2021). Kesulitan tersebut membuat rumah tangga yang tinggal di perdesaan memiliki peluang yang kecil untuk mengembangkan dirinya melalui pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan melalui pekerjaan dengan upah layak.

Fenomena kemiskinan terus menjadi kekhawatiran banyak negara di dunia. Oleh karena itu, dalam penyusunan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pengentasan kemiskinan menjadi salah satu masalah paling mendasar yang harus ditanggulangi. Indonesia sebagai salah satu negara anggota dari PBB, diberikan tanggung jawab untuk bisa mencapai poin-poin SDGs pada tahun 2030. Pemerintah Indonesia membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang ditetapkan lima tahun sekali untuk mencapai target SDGs. Adapun, RPJMN 2014-2019 dalam dimensi tingkat kemiskinan belum mencapai target atau sulit tercapai karena terkendala pada akurasi data dalam proses penyaluran bantuan sosial (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2019). Oleh karena itu, pemerintah pun menetapkan strategi baru untuk pengentasan kemiskinan dalam RPJMN 2020-2024 yang menetapkan target mengenai penurunan kemiskinan antara 7% hingga 6% atau 18.34 juta sampai 19.75 juta penduduk pada akhir tahun 2024 dengan meningkatkan program perlindungan sosial (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2019).

Upaya untuk mencapai target RPJMN 2020-2024 dilakukan dengan memberikan subsidi kepada masyarakat miskin untuk membantu meningkatkan taraf hidupnya. Implementasi subsidi sangat penting untuk meningkatkan daya beli masyarakat agar dapat mengkonsumsi barang dan jasa yang lebih banyak. Begitu juga yang diharapkan untuk masyarakat miskin, pemberian subsidi diharapkan dapat mempertahankan daya beli masyarakat miskin untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dasar. Dari hasil penelitian Barrientos' (2011) dalam Wagle, (2017) menemukan bahwa negara-negara dengan pengeluaran perlindungan sosial yang tinggi diperkirakan memiliki rasio jumlah penduduk miskin yang jauh lebih rendah. Di Indonesia, anggaran untuk perlindungan sosial yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebesar 15,5% dari APBN atau sekitar 387.3 triliun di tahun 2019 (Badan Pusat Statistik, 2019). Anggaran perlindungan sosial tersebut salah satunya mencakup program *Conditional Cash Transfer* (CCT) atau bantuan tunai bersyarat.

CCT merupakan program pengentasan kemiskinan dengan memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sasaran yang digunakan secara bersyarat untuk pendidikan dan Kesehatan. Kebijakan CCT pertama kali diimplementasikan di negara-negara Amerika Latin dan Karibia sebagai hasil reformasi program penanggulangan kemiskinan (Ibarrarán et al., 2017). Menurut Fiszbein et al. (2009) CCT menjadi salah satu program yang efektif untuk redistribusi pendapatan kepada masyarakat miskin. Adapun pendapat lain mengenai program CCT dari Freeland (2007) bahwa CCT sulit diimplementasikan di negara-negara miskin karena bantuan tunai bersyarat memiliki skema yang sangat kompleks, selain itu, CCT dikatakan tidak bermoral karena merampas bantuan yang layak diterima orang yang paling membutuhkan jika mereka gagal memenuhi persyaratan tertentu.

Implementasi CCT terhadap pengurangan kemiskinan di beberapa negara memberikan hasil yang berbeda-beda. Kasus di beberapa negara terbukti bahwa CCT berhasil menurunkan kemiskinan seperti di Negara Nikaragua yang dapat mengurangi rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan sebesar 5% setelah dua tahun dan Kolombia yang berhasil mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 3% setelah empat tahun (Saavedra, 2016). Namun, program CCT di Negara Kamboja dan Ekuador tidak memiliki dampak terhadap peningkatan konsumsi rata-rata peserta program CCT, sehingga dapat dipastikan program CCT tidak mengurangi kemiskinan secara nasional (Fiszbein et al., 2009). Keberhasilan program CCT tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk respons dari perilaku dan ekonomi politik suatu negara (Fiszbein et al., 2009).

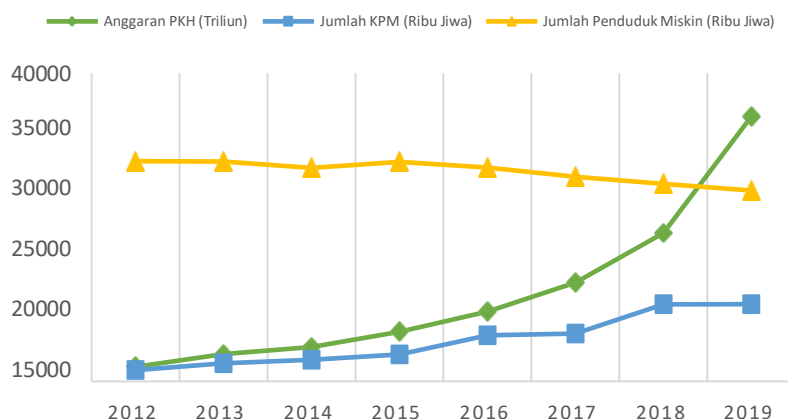
CCT Di Indonesia diwujudkan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yang mulai diterapkan dari tahun 2007. Menurut UU No.1 tahun 2018 pasal 2, PKH memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial dan memutus rantai kemiskinan serta memperkecil kesenjangan. Ketika diluncurkan pada tahun 2007, KPM yang dipilih merupakan keluarga atau individu yang berada di bawah 80% garis kemiskinan pada saat itu (Nazara & Rahayu, 2013). Awal penetapan sasaran PKH menggunakan Survei Pendidikan dan Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan (SPDKP) yang dilakukan oleh BPS mencakup sekitar 388.000 keluarga miskin dari 7 provinsi, hingga pada 2012 penetapan sasaran PKH menggunakan Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Sekretariat TN2PK (Nazara & Rahayu, 2013).

Implementasi PKH memiliki dampak positif terhadap peningkatan kesehatan dan pendidikan yang ditunjukkan dengan pengurangan kasus stunting pada anak-anak dan peningkatan pendaftaran sekolah pada remaja (Cahyadi et al., 2020). Penelitian dari Syamsulhakim & Nurzanty (2021) menunjukkan bahwa PKH berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan rumah tangga, terbukti dari survei yang dilakukan bahwa rumah tangga yang sudah lulus dari PKH cenderung memiliki karakteristik sosial ekonomi yang mendukung produktivitas dibandingkan dengan rumah tangga yang masih menerima PKH. Menurut World Bank (2011), PKH efektif dalam meningkatkan kesejahteraan KPM dari sisi pengeluaran dan juga kesehatan, namun berdampak kecil pada sisi pendidikan yang terbukti bahwa tidak adanya perubahan signifikan dalam tingkat pendaftaran sekolah dan tingkat putus sekolah dalam tiga tahun implementasi PKH.

Meskipun PKH menunjukkan dampak positif, implementasinya masih menghadapi berbagai permasalahan seperti ketidakakuratan data penerima bantuan, distribusi bantuan yang tidak merata, dan pemanfaatan bantuan yang tidak sesuai. Dari hasil kajian Syamsulhakim & Nurzanty (2021), mengindikasikan bahwa pemutakhiran data sosial ekonomi oleh pendamping PKH seharusnya dilakukan setahun sekali, tetapi hal ini belum terlaksana dengan baik. Dengan pemutakhiran, data penerima yang sudah tidak memenuhi syarat dapat dilakukan graduasi, sementara data penerima baru yang layak dapat ditambahkan. Hal ini akan meningkatkan efektivitas penyaluran PKH.

Cakupan PKH berkembang sedemikian rupa dengan dorongan pemerintah yang mengunggulkan program ini. Dari kajian Kurnaini et al. (2021), menjelaskan bahwa dari banyaknya bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia, PKH merupakan

yang paling efektif dalam menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. Hingga pada tahun 2018 mencapai 10 juta KPM. Hal ini menjadikan PKH sebagai program bantuan tunai bersyarat terbesar kedua di dunia.



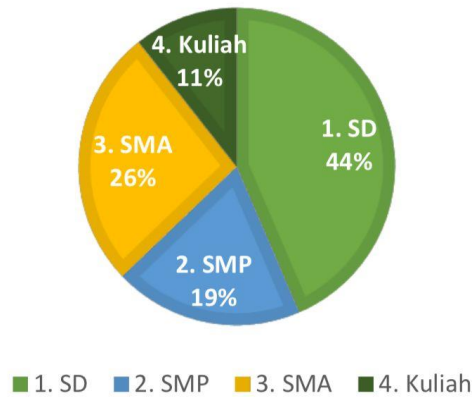
Gambar 4. Anggaran PKH, jumlah kpm, dan penduduk miskin di Indonesia (2012-2019)

Sumber: Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan BPS (Diolah)

Berdasarkan Gambar 4, anggaran PKH dan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengalami tren yang meningkat, sedangkan jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami tren yang menurun. Anggaran PKH yang meningkat dapat menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah tunjangan KPM atau cakupan PKH. Artinya, jumlah tunjangan yang diterima oleh KPM saat ini dapat meningkatkan konsumsi KPM yang pada akhirnya berpengaruh pada penurunan kemiskinan. Dengan demikian, PKH memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.

Dari beberapa penelitian, faktor-faktor seperti pendidikan, status pekerjaan, dan ukuran rumah tangga berkaitan erat dengan kemiskinan Dartanto & Nurkholis (2011), Garza-Rodriguez et al. (2021), Geda et al. (2001), dan Peng et al. (2019). Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan erat dengan kemiskinan maka dapat membantu pemerintah dalam menyusun strategi atau kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan rumah tangga yang lebih akurat.

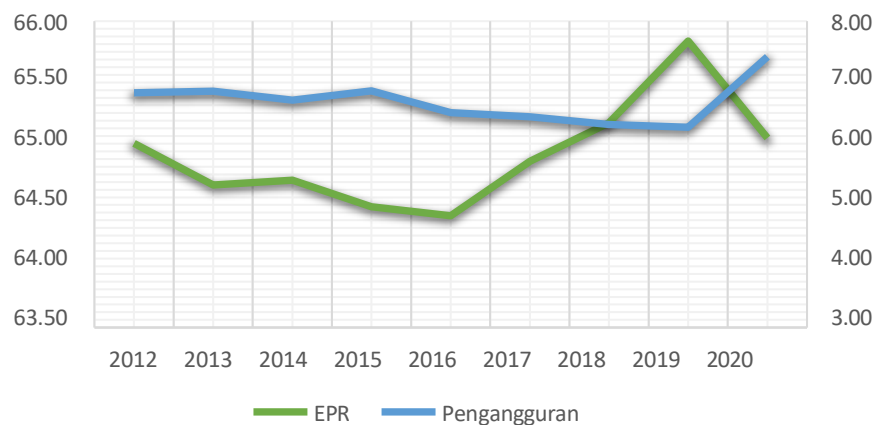
Kondisi pendidikan di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 5, bahwa jenjang pendidikan tertinggi/ yang sedang/ pernah diikuti oleh masyarakat di tahun 2020 masih didominasi oleh lulusan SD. Adapun, berdasarkan capaian Programme for International Students Assessment (PISA) di tahun 2018, Indonesia menduduki peringkat 10 terbawah di antara negara-negara Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) (Nur'aini et al., 2021). Hal ini dapat menggambarkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih terbilang rendah karena masyarakat tidak memiliki kompetensi dan kemampuan yang mumpuni untuk bersaing baik secara global maupun lokal.



Gambar 5. Jenjang pendidikan tertinggi atau sedang/ pernah diikuti (2020)
 Sumber: Susenas, 2020 (diolah)

Melalui pendidikan, kemampuan dan pengetahuan individu dapat meningkat dan terasah dengan baik. Selain itu, pendidikan dapat meningkatkan peluang individu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dengan pendapatan yang lebih tinggi (Dartanto & Nurkholis, 2011). Dengan demikian, ketidakmampuan dalam bersaing akan mengarah pada peningkatan pengangguran dan kemiskinan.

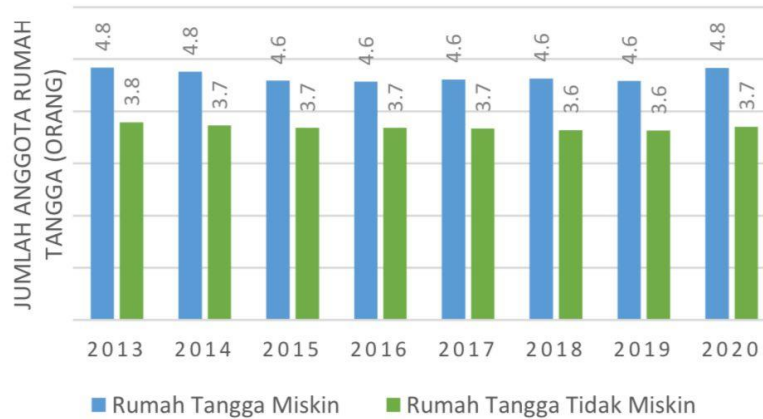
Kondisi tenaga kerja di Indonesia, dapat dilihat pada Gambar 6 yang menggambarkan perbandingan Employment to Populataion Ratio (EPR) dengan Pengangguran di Indonesia. Dapat dilihat bahwa pengangguran memiliki trendline yang cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sedangkan, EPR memiliki trendline yang positif, artinya penduduk dengan umur produktif yang bekerja cenderung mengalami peningkatan, peningkatan EPR juga mengindikasikan bahwa penyerapan tenaga kerja meningkat.



Gambar 6. Rasio lapangan kerja terhadap jumlah penduduk dan pengangguran di Indonesia (2012-2020)
 Sumber: BPS dan World Bank (diolah)

Dapat dilihat juga pada Gambar 6, di tahun 2019, EPR mengalami peningkatan menjadi 65,74% yang sebelumnya sebesar 64,67%, Adapun pengangguran di periode yang sama juga ikut menurun menjadi 5,23% yang sebelumnya sebesar 5,30%. Dengan

demikian meningkatnya EPR atau penyerapan tenaga kerja dapat membuat individu lebih mudah untuk memiliki pekerjaan sehingga pengangguran ikut menurun. Individu yang memiliki pekerjaan cenderung dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat keluar dari kemiskinan. Adapun, faktor demografi yang mempengaruhi kemiskinan salah satunya adalah jumlah anggota keluarga.



Gambar 7. Rata-rata anggota rumah tangga (2013-2020)
Sumber: BPS (diolah)

Berdasarkan Gambar 7, rumah tangga miskin memiliki jumlah anggota rumah tangga yang lebih besar dibandingkan rumah tangga tidak miskin, yaitu lebih besar 1 orang. Rumah tangga miskin memiliki rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebesar 5 orang, sedangkan rumah tangga tidak miskin memiliki rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebesar 4 orang. Peningkatan jumlah anggota rumah tangga dari tahun 2013-2020, baik rumah tangga miskin atau rumah tangga tidak miskin tidak mengalami perubahan yang signifikan setiap tahunnya.

Metodologi

Partisipan

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data cross-section berupa data rumah tangga. Data yang digunakan merupakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020 yang memiliki sampel sebanyak 320.000 rumah tangga sampel yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Data yang digunakan antara lain, status kemiskinan, penerima PKH, jumlah anggota rumah tangga, wilayah tempat tinggal, pekerjaan, dan pendidikan.

Dalam proses pengolahan data, dilakukan seleksi variabel untuk proses seleksi variabel penelitian melalui pertanyaan susenas, mendeskripsikan variabel penelitian, menganalisis dengan metode regresi logit, dan uji asumsi klasik untuk pengujian model yang digunakan.

Pengukuran

Dalam penelitian ini, variabel dalam penelitian ini tinjauan teori dan studi literatur yang berkaitan dengan kemiskinan. Adapun variabel yang terkait PKH diambil dari jurnal Prayasta & Budhi (2021) dan Waluyo & Khoirunurrofik (2021), sedangkan variabel faktor sosio-ekonomi berasal dari jurnal acuan Achia et al. (2010), Lekobane & Seleka (2017), dan Quispe-Mamani et al. (2022).

Tabel 1. Variabel penelitian

Variabel	Rata-rata	Persen
<i>Dependent</i>		
Status Kemiskinan		
0: Tidak Miskin		75,37
1: Miskin		24,63
<i>Independent</i>		
Penerima PKH		
0: Sudah Tidak Menerima		3,84
1: Masih Menerima		96,16
Pendidikan Terakhir		
1. SD		46,16
2. SMP		28,67
3. SMA		22,47
4. Kuliah		2,70
Status Pekerjaan		
0: Tidak		98,23
1: Ya		1,77
Tempat Tinggal		
0: Desa		58,47
1: Kota		41,53
Anggota Rumah Tangga	5	
N= 15.254.235		

Sumber: Susenas, 2020 (diolah)

Analisis

Status Kemiskinan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori yaitu rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin. Klasifikasi kategori tersebut mengacu pada klasifikasi Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap penduduk miskin. BPS mengategorikan penduduk miskin merupakan penduduk yang pengeluaran per kapitanya di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pertanyaan pengeluaran makanan dan bukan makanan selama sebulan terakhir. Maka dibentuk variabel *binary* dengan kategori “0” berupa rumah tangga yang dinyatakan tidak miskin karena memiliki pengeluaran diatas garis kemiskinan dan “1” berupa rumah tangga yang dinyatakan miskin karena memiliki pengeluaran di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan mengacu pada periode yang sama dengan data Susenas yang digunakan yaitu periode Maret 2020 yang dipublikasikan oleh BPS sebesar Rp 454.652 secara nasional. Dengan demikian, dari total observasi didapatkan 75,37% rumah tangga berada di atas garis kemiskinan dan 24,63% rumah tangga berada di bawah garis kemiskinan.

Variabel Penerima PKH dalam penelitian ini dibentuk dari pertanyaan yang digunakan yaitu “Apakah saat ini rumah tangga Anda masih tercatat sebagai penerima PKH?” dengan pilihan jawaban ya, tidak, dan tidak tahu. Bagi responden yang menjawab tidak tahu, dalam penelitian ini jawaban tersebut dikeluarkan. Sedangkan untuk pilihan jawaban “iya” menjadi kategori “1” yang mengindikasikan bahwa rumah tangga tersebut masih menerima PKH, sedangkan jawaban “tidak” menjadi kategori “0” yang menjelaskan bahwa rumah tangga tersebut kini sudah tidak terdaftar sebagai peserta PKH. Selanjutnya, didapatkan 96,16% rumah tangga masih menerima PKH dan 3,84% rumah tangga sudah tidak menerima PKH. Dengan demikian, penelitian ini lebih terfokus kepada rumah tangga PKH dikarenakan dari cleaning data hanya menyisakan data rumah tangga yang masih menerima dan sudah tidak menerima PKH.

Variabel Pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan jenjang pendidikan tertinggi/yang sedang/pernah diikuti oleh responden. Ada 22 variasi jawaban yang disediakan dalam buku Susenas yang dalam penelitian ini dibagi ke dalam 4 kategori yaitu SD, SMP, SMA, dan Kuliah. Bagi responden yang memilih jawaban Paket A, SD, SDLB, dan MI maka termasuk kategori “1” yaitu SD, selanjutnya untuk responden yang menjawab Paket B, SMP, SMP LB, dan MTS maka termasuk kategori “2” yaitu SMP. Responden yang menjawab Paket C, SMLB, SMA, MA, SMK, MAK maka termasuk kategori “3” yaitu SMA, sedangkan bagi responden yang menjawab D1/D2, D3, D4, S1, Profesi, S2, dan S3 maka masuk pada kategori “4” yaitu Kuliah. Dari hasil pengolahan data, sebanyak 46,16% rumah tangga termasuk kategori SD, 28,67% termasuk kategori SMP, 22,47% kategori SMA, dan 2,7% rumah tangga termasuk kategori kuliah.

Variabel Pekerjaan yang dibentuk dalam penelitian ini berasal dari pertanyaan “Apakah (nama) mempunyai pekerjaan/usaha, tetapi sementara tidak bekerja?” Adapun pekerja yang memiliki pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah situasi seseorang yang memiliki pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara berhenti bekerja dikarenakan berbagai sebab, seperti sakit, cuti, menunggu panen, mogok, dan sebagainya. Sehingga dari pertanyaan tersebut dibagi dalam dua kategori, yaitu kategori “1” untuk rumah tangga yang memiliki pekerjaan dan “0” untuk rumah tangga yang saat ini tidak memiliki pekerjaan. Oleh karena itu, didapatkan 98,23% rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan dan 1,77% rumah tangga yang memiliki pekerjaan. Dari besarnya hasil rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan dapat berkaitan dengan adanya pandemi covid-19, mengingat terjadinya pandemi dan Susenas yang digunakan dalam periode yang sama dan juga berkaitan dengan hasil merging dengan data PKH.

Daerah Tempat Tinggal dalam penelitian ini mengacu pada perdesaan dan perkotaan tempat rumah tangga berada. Sehingga, data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari klasifikasi desa/kota yang ada di Susenas. Dari data Susenas, klasifikasi “1” merupakan perkotaan dan “2” merupakan perdesaan. Dari klasifikasi tersebut, maka dilakukan pengkodean ulang untuk perdesaan menjadi “0”. Sehingga, kategori binary yang digunakan dalam penelitian ini menjadi “1” untuk perkotaan dan “0” untuk perdesaan. Dengan demikian, didapatkan sebanyak 58,47% rumah tangga berada di desa dan 41,53% berada di kota.

Hasil

Uji Multikolinearitas

Pada penelitian ini, uji multikolinearitas menggunakan uji korelasi Pair Wise. Multikolinearitas terjadi pada model jika memiliki nilai koefisien lebih dari $|0.70|$, begitu pun sebaliknya jika model memiliki nilai koefisien kurang dari $|0.70|$ maka model tidak ada korelasi antar variabel bebas yang digunakan. Hasil uji korelasi Pair Wise dapat dilihat pada table 4.1. Uji korelasi Pair Wise menunjukkan bahwa hubungan variabel pekerjaan, pendidikan, jumlah anggota rumah tangga, dan daerah tempat tinggal terhadap variabel PKH memiliki nilai koefisien masing-masing adalah $|0.003|$, $|0.006|$, $|0.035|$, $|0.009|$. Adapun, hubungan variabel pekerjaan, jumlah anggota rumah tangga, dan daerah tempat tinggal terhadap pendidikan memiliki nilai koefisien masing-masing $|0.015|$, $|0.060|$, $|0.054|$. Hubungan variabel jumlah anggota rumah tangga dengan daerah tempat tinggal terhadap pekerjaan memiliki nilai koefisien sebesar $|0.023|$ dan $|0.017|$. Terakhir, variabel daerah tempat tinggal terhadap jumlah anggota rumah tangga memiliki nilai koefisien $|0.011|$. Dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan tidak memiliki multikolinearitas atau tidak ada hubungan antara variabel-variabel bebas yang digunakan karena nilai koefisien kurang dari $|0.70|$.

Tabel 2. Hasil korelasi pair wise

Variabel	PKH	Pendidikan	Status Pekerjaan	Jumlah Anggota Rumah Tangga	Wilayah Tempat Tinggal
PKH	1.000				
Pendidikan	-0.006	1.000			
Status Pekerjaan	-0.003	-0.015	1.000		
Jumlah Anggota Rumah Tangga	0.035	0.060	-0.023	1.000	
Wilayah Tempat Tinggal	-0.009	0.054	0.017	-0.011	1.000

Uji Heteroskedastis

Uji heteroskedastis digunakan untuk melihat perbedaan varian residual pada setiap pengamatan variabel bebas yang digunakan. Pada penelitian ini, uji heteroskedastis menggunakan metode robust standard error. Dengan penggunaan robust standard error, diasumsikan model yang digunakan sudah terbebas dari permasalahan heteroskedastis.

Analisis Efek Marginal

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Program Keluarga Harapan (PKH) dan faktor sosio-ekonomi dan demografi terhadap kemiskinan rumah tangga penerima PKH. Dengan jumlah observasi lebih dari 15 juta rumah tangga, didapatkan bahwa variabel PKH memiliki hubungan yang positif signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga.

Tabel 3. Hasil regresi logit

Variabel	Efek Marginal
PKH	0.0551*** (0.000628)
Pendidikan (<i>Basegroup: SD</i>)	
2. SMP	-0.0319*** (0.000260)
3. SMA	-0.0818*** (0.000267)
4. Kuliah	-0.105*** (0.000589)
Status Pekerjaan	-0.00519*** (0.000830)
Jumlah Anggota Keluarga	0.0447*** (5.62e-05)
Daerah Tempat Tinggal (<i>Basegroup: Desa</i>)	-0.0603*** (0.000222)
Observasi	15,215,245

*Standard errors in parentheses: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1*

Sumber: Data Susenas (2020) (Diolah)

Dapat dilihat pada Tabel 3, bahwa rumah tangga yang masih menerima PKH memiliki peluang untuk tetap miskin sebesar 5,5% dibandingkan dengan rumah tangga yang sudah tidak menerima program ini. Hasil tersebut menjelaskan bahwa rumah tangga yang masih menerima PKH tentunya masih tercatat sebagai rumah tangga miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang memenuhi kriteria dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Mengacu pada Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Pasal 3 tahun 2018, bahwa sasaran PKH merupakan keluarga atau seseorang yang miskin serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, atau kesejahteraan sosial. Dengan demikian, PKH yang ditujukan berada tepat sasaran untuk rumah tangga miskin.

Tujuan PKH secara jangka panjang adalah mengeluarkan rumah tangga dari kemiskinan antar-generasi dengan meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, sedangkan tujuan jangka pendek dari PKH sebagai alat untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga miskin agar rumah tangga miskin tidak jatuh ke jurang kemiskinan yang lebih dalam. Penelitian ini menggunakan data cross-section, sehingga penelitian ini tidak dapat menangkap tujuan jangka panjang dari PKH. Oleh sebab itu, rumah tangga yang masih menerima PKH bukan berarti program PKH tidak berhasil untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga tersebut, namun rumah tangga PKH membutuhkan jangka waktu yang lebih banyak untuk memutus rantai kemiskinan. Penerima bantuan PKH memiliki jangka waktu kepesertaan selama 6 tahun, diharapkan dalam periode waktu tersebut terjadi perubahan terhadap rumah tangga PKH baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan peningkatan status ekonomi (Kementerian Sosial,

2021). Dalam jangka waktu tersebut, KPM PKH akan diresertifikasi untuk menentukan status kepesertaan, jika KPM PKH dianggap masih layak untuk mendapatkan bantuan selama tiga tahun kedepan dan wajib melaksanakan kewajiban PKH.

Penelitian ini sejalan dengan temuan Cahyadi et al. (2020) bahwa bantuan PKH tidak mengubah kemiskinan kepada mereka yang saat ini masih mengikuti program, tetapi memungkinkan adanya pemutusan rantai kemiskinan antar generasi karena adanya peningkatan pendaftaran sekolah dan penurunan stunting. Sedangkan, hasil penelitian ini arahnya berbanding terbalik dengan penelitian Prayasta & Budhi (2021) yang mendapatkan bahwa PKH berhubungan negatif dengan kemiskinan, artinya rumah tangga yang menerima PKH lebih mungkin untuk keluar dari kemiskinan dibandingkan rumah tangga yang tidak menerima PKH. Perbedaan arah yang dihasilkan dikarenakan adanya perbedaan pada pertanyaan survei yang digunakan. Dalam penelitian ini, pertanyaan yang digunakan membandingkan antara rumah tangga yang masih menerima dengan yang sudah tidak menerima PKH, sedangkan dalam penelitian Prayasta & Budhi (2021) membandingkan antara rumah tangga yang menerima PKH dengan yang tidak menerima PKH.

Rumah tangga yang masih menerima PKH sulit untuk keluar dari kemiskinan dikarenakan adanya perbedaan karakteristik dengan rumah tangga yang sudah tidak menerima PKH. Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Syamsulhakim & Nurzanty (2021) mengenai rumah tangga graduasi atau yang telah lulus dari PKH terlihat bahwa rumah tangga yang masih menerima PKH cenderung memiliki pendidikan yang lebih rendah, kepala rumah tangga yang berada diusia tidak produktif, dan bekerja disektor informal ataupun pertanian dibandingkan dengan rumah tangga yang telah lulus dari PKH. Dengan karakteristik tersebut, tentunya sangat sulit bagi rumah tangga yang masih menerima PKH untuk keluar dari kemiskinan.

Meninjau dari teori Investasi dalam Sumber Daya Manusi bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan dua faktor yang saling terkait, kesehatan yang semakin meningkat dapat meningkatkan pengembalian investasi pada pendidikan karena kesehatan merupakan salah satu faktor pada kehadiran sekolah dan proses pembelajaran pada anak, begitu pun sebaliknya pendidikan yang tinggi akan meningkatkan kesadaran mengenai kesehatan (Todaro & Smith, 2015). Oleh sebab itu, PKH mewajibkan peserta untuk verifikasi komitmen yang dilakukan setiap sebulan sekali yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh anggota KPM hadir dan mengakses layanan kesehatan dan pendidikan secara rutin dengan aturan yang ditetapkan (Kementerian Sosial, 2021). Verifikasi komitmen ini dilakukan agar tidak ada penyelewengan bantuan yang diberikan, sehingga diharapkan anak-anak dari KPM dapat memutus rantai kemiskinan karena memiliki modal pengetahuan dan keterampilan serta fisik yang lebih sehat sehingga akan mendorong produktivitas mereka.

Adanya keterbatasan data membuat penelitian ini hanya dapat menangkap hasil jangka pendek dari PKH. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak dapat melihat bagaimana dampak PKH dalam menurunkan kemiskinan. Meskipun begitu, dari Gambar 4 yang menjelaskan mengenai anggaran PKH, jumlah KPM, dan jumlah penduduk miskin di Indonesia selama 7 tahun terlihat adanya penurunan penduduk miskin. Merujuk dari gambar tersebut, PKH memiliki dampak terhadap penurunan kemiskinan, sehingga PKH

masih sangat penting untuk diterapkan agar rumah tangga miskin memiliki jaring pengaman yang tidak hanya membantu secara keuangan atau ekonomi, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari rumah tangga tersebut.

Dibandingkan dengan faktor sosio-ekonomi lainnya yang digunakan dalam penelitian ini, status pekerjaan memberikan peluang paling kecil untuk menyejahterakan rumah tangga. Tidak hanya memperluas kesempatan kerja, menciptakan pekerjaan yang produktif dan layak juga sangat penting. Dari data yang disajikan oleh International Labour Organization (2022), di Indonesia, persentase pekerja yang berada dalam kemiskinan ekstrem sebesar 2%, 16% dikategorikan sebagai cukup miskin, dan 29% mendekati kategori miskin. Sedangkan, negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand persentase pekerja yang dikategorikan miskin dan cukup miskin berada di bawah 1%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang belum memenuhi indikator pekerjaan layak di Indonesia. Hal ini berkaitan juga dengan teori *Dual Labor Market*, bahwa pasar tenaga kerja dibagi menjadi dua yaitu sektor primer dan sekunder, sektor primer merupakan pasar tenaga kerja yang memberikan upah yang layak, kondisi pekerjaan yang aman dan bersih, jaminan keamanan kerja, dan berpotensi untuk dipromosikan, sedangkan sektor sekunder merupakan kebalikannya. Dari perspektif teori tersebut salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan memberikan akses ke pasar tenaga kerja sektor primer (Thompson & Gray, 1995).

Pembahasan

Dalam penelitian ini, pertanyaan yang digunakan untuk menganalisis pengaruh faktor pendidikan terhadap kemiskinan rumah tangga PKH adalah jenjang pendidikan tertinggi yang pernah atau sedang diikuti oleh rumah tangga. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa, pendidikan memiliki hubungan yang negatif signifikan terhadap status kemiskinan individu. Individu yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) akan menurunkan peluang rumah tangga menjadi miskin sebesar 3,2% dibandingkan dengan individu berpendidikan Sekolah Dasar (SD). Sedangkan, Individu yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMA) akan menurunkan peluang rumah tangga menjadi miskin sebesar 8,2% dibandingkan dengan individu yang berpendidikan SD. Adapun, Individu yang berkuliah menurunkan peluang rumah tangga menjadi miskin sebesar 10,5% dibandingkan individu yang berpendidikan SD. Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat semakin tinggi pendidikan yang diperoleh oleh individu maka akan semakin kecil pula peluang rumah tangga tersebut menjadi miskin.

Penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Achia et al. (2010), Awan et al. (2011), Quispe-Mamani et al. (2022), Waluyo & Khoirunurrofik (2021) yang mendapatkan bahwa pendidikan mempengaruhi dan berhubungan negatif dengan kemiskinan, artinya pendidikan yang ditempuh oleh rumah tangga baik kepala keluarga ataupun anggota rumah tangga lainnya memiliki kontribusi untuk menurunkan kemiskinan secara bertahap. Dengan pendidikan dapat meningkatkan modal manusia dan partisipasi dalam pasar tenaga kerja serta dapat meningkatkan kinerja bisnis di kalangan rumah tangga wiraswasta (Lekobane & Seleka, 2017). Rumah tangga dengan pendidikan tinggi tentunya memiliki modal pengetahuan dan keterampilan yang

lebih mumpuni dibandingkan dengan rumah tangga berpendidikan rendah sehingga peluang rumah tangga berpendidikan tinggi menjadi sejahtera lebih tinggi. Hal ini dikarenakan, pekerjaan dengan gaji yang tinggi biasanya memiliki kualifikasi yang tinggi karena pekerjaan yang akan dilakukan membutuhkan kemampuan atau pengetahuan yang hanya dapat diperoleh dari mengikuti pelatihan atau pendidikan tinggi. Dibuktikan dengan laporan dari INOMICS (2020), bahwa individu yang memiliki gelar Ph.D. memperoleh penghasilan 86% lebih banyak dibandingkan dengan individu yang memiliki gelar Master. Sedangkan individu dengan gelar master memperoleh penghasilan sekitar 36% lebih banyak dibandingkan individu yang bergelar sarjana.

Status pekerjaan yang dimiliki oleh anggota rumah tangga memiliki hubungan yang negatif signifikan. Individu yang memiliki pekerjaan menurunkan peluang rumah tangga menjadi miskin sebesar 0,5% dibandingkan individu yang tidak memiliki pekerjaan. Individu yang memiliki pekerjaan tentunya lebih mungkin untuk memenuhi kebutuhannya dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Dartanto & Nurkholis (2011) yang menunjukkan bahwa jika salah satu anggota rumah tangga bekerja, kemungkinan keluarga tersebut menjadi miskin akan menurun. Begitu pun dengan penelitian Lekobane & Seleka (2017) bahwa kepala rumah tangga yang bekerja cenderung tidak mengalami kemiskinan dan memiliki konsumsi per kapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang menganggur.

Dibandingkan dengan faktor sosio-ekonomi lainnya yang digunakan dalam penelitian ini, status pekerjaan memberikan peluang paling kecil untuk menyejahterakan rumah tangga. Tidak hanya memperluas kesempatan kerja, menciptakan pekerjaan yang produktif dan layak juga sangat penting. Dari data yang disajikan oleh International Labour Organization (2022), di Indonesia, persentase pekerja yang berada dalam kemiskinan ekstrem sebesar 2%, 16% dikategorikan sebagai cukup miskin, dan 29% mendekati kategori miskin. Sedangkan, negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand persentase pekerja yang dikategorikan miskin dan cukup miskin berada di bawah 1%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang belum memenuhi indikator pekerjaan layak di Indonesia. Hal ini berkaitan juga dengan teori *Dual Labor Market*, bahwa pasar tenaga kerja dibagi menjadi dua yaitu sektor primer dan sekunder, sektor primer merupakan pasar tenaga kerja yang memberikan upah yang layak, kondisi pekerjaan yang aman dan bersih, jaminan keamanan kerja, dan berpotensi untuk dipromosikan, sedangkan sektor sekunder merupakan kebalikannya. Dari perspektif teori tersebut salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan memberikan akses ke pasar tenaga kerja sektor primer (Thompson & Gray, 1995).

Berdasarkan hasil penelitian, daerah tempat tinggal memiliki hubungan negatif signifikan terhadap kemiskinan. Individu yang tinggal di perkotaan memiliki peluang untuk menjadi miskin sebesar 6% dibandingkan Individu yang tinggal di perdesaan. Artinya, rumah tangga yang tinggal di perkotaan lebih mungkin untuk menjadi miskin dibandingkan rumah tangga yang tinggal perdesaan. Hasil dari penelitian ini berbanding terbalik dengan temuan Achia et al., (2010), Lekobane & Seleka (2017), Quispe-Mamani et al. (2022) yang menyatakan bahwa rumah tangga yang tinggal di perdesaan lebih mungkin untuk menjadi miskin karena adanya keterbatasan akses infrastruktur, pendidikan, dan kesempatan kerja. Kemiskinan di perkotaan lebih kompleks dan bersifat

multidimensi, tidak hanya mengenai pendapatan dan konsumsi tetapi dimensinya banyak terkait dengan kerentanan masyarakat miskin karena akses yang tidak memadai terhadap tanah dan perumahan, infrastruktur fisik dan pelayanan, sumber ekonomi dan mata pencaharian, fasilitas kesehatan dan pendidikan, dan jaringan pengaman sosial, serta pemberdayaan (Asian Development Bank, 2014). Situasi kemiskinan di perkotaan dapat dijelaskan dengan tingginya biaya hidup di perkotaan, terbatasnya peluang bagi individu untuk memenuhi kebutuhan mereka, dampak negatif dari ketidakstabilan sosial, serta persaingan yang ketat antara penduduk lokal dan imigran dalam mendapatkan pekerjaan (Cano, 2019).

Hasil penelitian ini dapat dikaitkan dengan teori model migrasi Todaro, rumah tangga akan melakukan keputusan ekonomi yang rasional yaitu berpindah dari desa ke kota untuk memiliki pendapatan yang lebih tinggi (Todaro & Smith, 2015). Namun, migrasi secara terus menerus karena keputusan ekonomi rasional tersebut akan memunculkan fenomena "*Urbanization of global poverty*" yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi pada dasarnya dapat mengurangi kemiskinan secara global, tetapi tidak banyak membantu mengurangi kemiskinan di perkotaan (Ravallion et al., 2007). Peningkatan migrasi dari desa ke kota dapat memberikan dampak negatif seperti peningkatan jumlah penduduk, pengangguran, pemukiman kumuh, peningkatan kriminalitas, dan dampak sosial lainnya. Dampak tersebut terjadi karena banyak dari mereka yang bermigrasi banyak yang tidak memiliki modal yang mumpuni untuk hidup di perkotaan, seperti halnya mereka tidak memiliki kemampuan dan keahlian dalam bersaing dengan penduduk perkotaan untuk mendapat pekerjaan. Dengan kesempatan kerja yang juga terbatas, maka mereka yang bermigrasi akan kesulitan untuk bertahan hidup karena tidak memiliki pendapatan, lalu membangun pemukiman kumuh untuk tempat tinggal, dan pada akhirnya kehidupan mereka sangat rentan terhadap kemiskinan karena tidak bisa memenuhi biaya hidup yang ada.

Selain itu, rumah tangga di perkotaan akan lebih sulit untuk mendapatkan program pengentasan kemiskinan karena persyaratan dari program tersebut biasanya diambil dari pendapatan nominal rumah tangga (Higgins, 2012). Hal ini disebabkan program pengentasan kemiskinan, seperti *Conditional Cash Transfer* memiliki batasan terhadap persyaratan pendapatan yang tidak disesuaikan dengan biaya hidup per regional (Higgins, 2012). Dengan demikian, rumah tangga yang hidup di perkotaan memiliki peluang menjadi miskin karena tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks dan terbatasnya perlindungan sosial yang diterima.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Fenomena kemiskinan terus terjadi menjadi kekhawatiran banyak negara di dunia. Kemiskinan yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial-ekonomi, seperti pendidikan dan pekerjaan serta faktor demografi seperti jumlah anggota rumah tangga dan daerah tempat tinggal. Pemerintah Indonesia memiliki target penurunan kemiskinan hingga 6% pada tahun 2024 yang tertulis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). Upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah dengan

memberikan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa rumah tangga yang masih menerima PKH memiliki probabilitas untuk tetap miskin dibandingkan rumah tangga yang sudah tidak menerima PKH. Dengan kata lain, penerima PKH berhak menerima bantuan PKH selama rumah tangga tersebut masih tetap miskin dan memenuhi syarat kelayakan penerima PKH. Faktor sosial-ekonomi, seperti rumah tangga dengan pendidikan tinggi dan memiliki pekerjaan, mempunyai peluang untuk menjadi lebih sejahtera lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang berpendidikan rendah dan tidak memiliki pekerjaan. Berdasarkan faktor demografi, rumah tangga yang memiliki anggota keluarga lebih sedikit dan tinggal di perdesaan memiliki peluang menjadi sejahtera lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang memiliki anggota keluarga lebih banyak dan tinggal di perkotaan.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan saran yang dapat diberikan kepada pemerintah adalah perlunya pengembangan Program Keluarga Harapan yang tidak hanya terfokus pada fasilitas pendidikan dan kesehatan anak tetapi juga dengan pengarahan dan pelatihan bagi kepala rumah tangga agar bisa lebih produktif, sehingga dapat memutus rantai kemiskinan lebih dini. Selain itu, disarankan juga untuk terus melakukan validasi dan pemutakhiran data penerima bantuan PKH agar program PKH dapat terus menjangkau kepada keluarga miskin yang membutuhkan bantuan. Masyarakat yang menerima PKH juga perlu aktif untuk mengikuti program-program yang diadakan oleh pemerintah dan menggunakan bantuan yang diberikan untuk kepentingan pokok dan terus memperhatikan pendidikan dan kesehatan anak.

Selain perlunya pengembangan terhadap Program Keluarga Harapan, pemerintah juga harus memperhatikan faktor-faktor seperti pendidikan, pekerjaan, daerah tempat tinggal, dan jumlah anggota rumah tangga yang secara nyata memiliki pengaruh terhadap kemiskinan atau kesejahteraan rumah tangga. Pemerintah diharapkan meningkatkan dan pemeratakan kualitas pendidikan serta mengampanyekan kembali wajib belajar selama 12 tahun secara intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan untuk pemberdayaan sumber daya manusia dan kesejahteraan individu. Di samping itu, pemerintah juga diharapkan membuka akses bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan disektor formal yang diindikasikan sebagai “Good Jobs” dengan memberikan pembinaan kepada pengusaha sektor informal, baik berupa modal dan pelatihan. Sedangkan untuk faktor jumlah anggota keluarga, pemerintah dapat melakukan penyuluhan/penyuluhan ke berbagai daerah terutama daerah yang sulit terpapar informasi mengenai pendidikan seks dan mempertegas aturan mengenai pernikahan dini. Dan terakhir, pemerataan infrastruktur dan pemberian kesempatan kerja serta penyesuaian pendapatan per regional yang meluas untuk menghindari migrasi dari desa ke kota secara besar yang dapat mengakibatkan kemiskinan di perkotaan.

Daftar Pustaka

- Achia, T. N. O., Wangombe, A., & Khadioli, N. (2010). A logistic regression model to identify key determinants of poverty using demographic and health survey data. *European Journal of Social Sciences*, 13(1), 38–45.
- ASEAN Secretariat. (2015). Report of the ASEAN Regional Assessment of MDG Achievement and Post-2015 Development Priorities. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Asian Development Bank. (2014). Urban Poverty in Asia. In *Asian Development Bank*. <http://hdl.handle.net/11540/3310>.
- Awan, M. S., Malik, N., Sarwar, H., & Waqas, M. (2011). Impact of education on poverty reduction. *International Journal of Academic Research*, 3(1), 660–666. http://content.ebscohost.com.ezproxy1.canberra.edu.au/pdf25_26/pdf/2011/AY08/01Jan11/59737662.pdf?T=P&P=AN&K=59737662&S=R&D=a9h&EbscoContent=dGJyMMvI7ESeprc40dvuOLCmr0ueprNSrq64SLGWxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGptFC3qLNMuePfgeyx44Dt6fIA
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah (Persen)*. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1759/sdgs_1/1
- Balisacan, A. M., Edillon, R. G., & Piza, S. F. A. (2005). Rural poverty in Southeast Asia: issues, policies, and challenges. *Asian Journal of Agriculture and Development*, 2(November 2014), 25–38. http://www.searca.org/ajad/archives/v-02/01-02/ajad_v2_n1_n2_balisacan_etal.pdf
- Bulow, J. I., & Summers, L. H. (1986). A Theory of Dual Labor Markets with Application to Industrial Policy, Discrimination, and Keynesian Unemployment. *Journal of Labor Economics*, 4(3, Part 1), 376–414. <https://doi.org/10.1086/298116>
- Cahyadi, N., Hanna, R., Olken, B. A., Prima, R. A., Satriawan, E., & Syamsulhakim, E. (2020). Cumulative Impacts of Conditional Cash Transfer Programs: Experimental Evidence from Indonesia. *American Economic Journal: Economic Policy*, 12(4), 88–110. <https://doi.org/10.1257/pol.20190245>
- Cakmankayapan, S., & Goktas, A. (2013). A comparison of binary logit and probit models with a simulation study. *Socoal and Economic Statistics*, 2(1), 1–17.
- Cano, A. B. (2019). Urban Poverty. In *The Wiley Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies* (pp. 1–7). John Wiley & Sons, Ltd. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9781118568446.eurs0388>
- Chen, J. (2022). *What's Poverty? Meaning, Causes, and How to Measure*. Investopedia. <https://www.investopedia.com/terms/p/poverty.asp>

Concern. (2022). *The Top 11 Causes of Poverty Around The World*. Concern Worldwide US. <https://www.concernusa.org/story/causes-of-poverty/>

Dartanto, T., & Nurkholis. (2011). Finding out of the Determinants of Poverty Dynamics in Indonesia : Evidence from Panel Data. *Forthcoming in: Bulletin of Indonesian Economic Studies* (2013), 41185.

Davis, E. P., & Sanchez-martinez, M. (2014). A review of the economic theories of poverty. *National Institute of Economic and Social Research*, 435, 1–65.

Deonandan, R. (2019). Defining Poverty: A Summary of Competing Models. *Journal of Social and Political Sciences*, 2(1). <https://doi.org/10.31014/aior.1991.02.01.44>

Fiszbein, A., Schady, N., Ferreira, F. H. G., Grosh, M., Keleher, N., Olinto, P., & Skoufias, E. (2009). Conditional Cash Transfers: Reducing Present and Future Poverty, A World Bank Policy Research Report. In *The World Bank*. World Bank.

Freeland, N. (2007). Superfluous, pernicious, atrocious and abominable? The case against conditional cash transfers. *IDS Bulletin*, 38(3), 75–78. <https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2007.tb00382.x>

Garza-Rodriguez, J., Ayala-Diaz, G. A., Coronado-Saucedo, G. G., Garza-Garza, E. G., & Ovando- Martinez, O. (2021). Determinants of poverty in Mexico: A quantile regression analysis. *Economies*, 9(2), 1–24. <https://doi.org/10.3390/economies9020060>

Geda, A., De Jong, N., Mwabu, G., & Kimenyi, M. S. (2001). Determinants of Poverty in Kenya: a Household Level Analysis. *ORPAS - Institute of Social Studies*, August, 1–25. <https://repub.eur.nl/pub/19095/wp347.pdf>

Halimah Sa'diyah, Y., & Arianti, F. (2012). Analisis Kemiskinan Rumah Tangga Melalui Faktor- Faktor Yang Mempengaruhinya Di Kecamatan Tugu Kota Semarang. *Journal of Economics*, 1(1), 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme>

Higgins, S. (2012). The Impact of Bolsa Família on Poverty: Does Brazil's Conditional Cash Transfer Program Have a Rural Bias? *Journal of Politics and Society*, 23(1), 88–125. <https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D8B27S8K%0Ahttps://doi.org/10.7916/D8B27S8K>

Ibarrarán, P., Medellín, N., Regalia, F., & Stampini, M. (2017). *How Conditional Cash Transfers Work: Good Practices after 20 Years of Implementation*. <https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8159/How-conditional-cash-transfers-work.PDF?sequence=9>

INOMICS. (2020). *Salary Report for Economists 2020 / 21*. https://inomics.com/sites/default/files/INOMICS_Salary_Report/INOMICS_Salary_Report_2020-2021.pdf

International Labour Organization. (2022). *Statistics on Working Poverty*. Data, Resources. <https://ilostat.ilo.org/topics/working-poverty/>

Izzati, R. Al. (2021). *Situasi Kemiskinan Selama Pandemi*. The SMERU Research Institute. <https://smeru.or.id/id/article-id/situasi-kemiskinan-selama-pandemi>

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2019). *Menko PMK akan Koordinasikan Program Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Stunting*. <https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-akan-koordinasikan-program-penurunan-tingkat-kemiskinan-dan-tingkat-stunting>

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019). *Evaluasi Akhir RPJMN 2015-2019*. Kementerian Sosial. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*.

Kurnaini, Z. D., Utomo, W., Iskandarsyah, N., Syafelifitria, I., Handayani, H., & Khaled. (2021). Peran Kebijakan Fiskal pada Produktivitas, Kemiskinan, dan Ketimpangan: Ditinjau dari Efektivitas Subsidi, Bantuan Sosial, dan Perpajakan. Kementerian Keuangan. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2021/12/31/2443-peran-kebijakan-fiskal-pada-produktivitas-kemiskinan-dan-ketimpangan-ditinjau-dari-efektivitas-subsidi-bantuan-sosial-dan-perpajakan>

Lee, Y. F., & Kind, M. (2021). *Reducing poverty and inequality in rural areas: key to inclusive development*. United Nations. <https://www.un.org/development/desa/dspd/2021/05/reducing-poverty/>

Lekobane, K. R., & Seleka, T. B. (2017). Determinants of Household Welfare and Poverty in Botswana, 2002/2003 and 2009/2010. *Journal of Poverty*, 21(1), 42–60. <https://doi.org/10.1080/10875549.2016.1141381>

Mihai, M., Țițan, E., & Manea, D. (2015). Education and Poverty. *Procedia Economics and Finance*, 32(15), 855–860. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01532-4](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01532-4)

Nazara, S., & Rahayu, S. K. (2013). Program Keluarga Harapan (PKH): Program Bantuan Dana Tunai Bersyarat di Indonesia. *International Policy Centre for Inclusive Growth*, 1(42), 1.

OXFAM, & UN Global Compact. (2015). *Poverty Footprint*. 72. https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/PovertyFootprint.pdf

Peng, C., Fang, L., Wang, J. S. H., Law, Y. W., Zhang, Y., & Yip, P. S. F. (2019). Determinants of Poverty and Their Variation Across the Poverty Spectrum: Evidence from Hong Kong, a High-Income Society with a High Poverty Level. In *Social Indicators Research* (Vol. 144, Issue 1). Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/s11205-018-2038-5>

Pimhidzai, O. (2018). *Climbing the ladder : poverty reduction and shared prosperity in Vietnam* (English) (No. 124916; 1). <http://documents.worldbank.org/curated/en/206981522843253122/Climbing-the-ladder-poverty-reduction-and-shared-prosperity-in-Vietnam>

Prayasta, I. G. H., & Budhi, M. K. S. (2021). The Impact of Program Keluarga Harapan on Households' Poverty Level Amidst Covid-19 Pandemic in Bali Province of Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 115(7), 55–65. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2021-07.06>

Quispe-Mamani, J. C., Aguilar-Pinto, S. L., Calcina-Álvarez, D. A., Ulloa-Gallardo, N. J., Madueño-Portilla, R., Vargas-Espinoza, J. L., Quispe-Mamani, F., Cutipa-Quilca, B. E., Tairo-Huamán, R. N., & Coacalla-Vargas, E. (2022). Social Factors Associated with Poverty in Households in Peru. *Social Sciences*, 11(12). <https://doi.org/10.3390/socsci11120581>

Ravallion, M., Chen, S., & Sangraula, P. (2007). New evidence on the urbanization of global poverty. *Population and Development Review*, 33(4), 667–701. <https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2007.00193.x>

Saavedra, J. E. (2016). The Effects of Conditional Cash Transfer Programs on Poverty Reduction, Human Capital Accumulation and Wellbeing. *University of Southern California and National Bureau of Economic Research*, 1–10. <http://www.un.org/esa/socdev/egms/docs/2016/Poverty-SDGs/JuanSaavedra-paper.pdf%0A>

Strawson, T., & Davis, E. (2017). Financing the Sustainable Development Goals in ASEAN. *ASEAN-China-UNDP Symposium on Financing the Implementation of the Sustainable Development Goals in ASEAN*.

Syamsulhakim, E., & Nurzanty, K. (2021). *Graduasi dari Program Bantuan Tunai Bersyarat di Indonesia : Hasil dari survei rumah tangga graduasi*. 1–102.

Thompson, A., & Gray, B. G. (1995). *Employment Structure and Poverty : Theoretical Perspectives and Conceptual Frameworks*. 77.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development (Twelfth Edition)*. Waluyo, B., & Khoirunurrofik. (2021). Hubungan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan Tingkat Kemiskinan di Daerah Tertinggal dan Non-tertinggal di Indonesia. *Indonesian*

Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, Dan Kebijakan Publik, 6(4), 361-373.

World Bank. (2011). *Program Keluarga Harapan: Main Findings from the Impact Evaluation of Indonesia's Pilot Household Conditional Cash Transfer Program*.

World Bank. (2018). Poverty and Shared Prosperity: Piecing Together the Poverty Puzzle. In *The World Bank Group*.

World Bank. (2022). *Poverty and Shared Prosperity 2022: Correcting Course*. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1893-6>.